

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup secara mandiri. Manusia satu dan yang lainnya harus saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu sesama manusia, salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli atau utang piutang. Utang piutang dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak adanya riba didalamnya yang dapat merugikan pihak yang berhutang (debitur). Hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa mengenai utang piutang, seperti menjaga kepentingan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, didalam utang piutang orang yang memberi hutang dibolehkan meminta jaminan kepada pihak yang berhutang untuk menjamin pinjaman yang diberikannya. Sehingga apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak kreditur boleh menjual barang jaminan itu. Hal ini dalam fiqh muamalah disebut dengan *ar-rahn* atau gadai.

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹ Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, gadai telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1150 yang disebut dengan kata *pandrecht* (hak gadai), yaitu suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atau benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.²

Dalam KUHPerdara, objek yang dijadikan jaminan hutang yaitu benda-benda bergerak, seperti halnya mobil, perhiasan, dan lainnya. Sedangkan dalam gadai hukum adat, objek yang dijadikan jaminan hutang yaitu benda tidak bergerak yang berupa tanah. Hukum adat tidak mengenal pelaksanaan gadai yang dilakukan individu dengan individu dengan objek barang bergerak. Seperti praktik gadai sawah yang terjadi di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang sudah lama ada. Praktik gadai ini biasa terjadi ketika masyarakat desa Astanalanggar memerlukan dana yang besar untuk suatu hal yang mendesak, sedangkan harta yang dapat mereka gadaikan dalam jumlah yang tinggi hanya tanah sawah, maka mereka akan menanggungkannya kepada *murtahin* (pemberi hutang).

Berdasarkan informasi dari beberapa warga Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang pernah melakukan gadai sawah, perjanjian gadai sawah menyebabkan pihak pemberi hutang (*murtahin*) berhak atas tanah sawah tersebut sepenuhnya dan boleh digarap dengan mengambil manfaat dari hasil garapan tanah tersebut. Jika pemilik tanah sawah tersebut ingin mengambil kembali tanah sawah yang telah digadaikannya tersebut, maka pemilik tanah sawah tersebut harus membayar uang yang sama dengan jumlah hutang. Selama hutang tersebut belum lunas, maka tanah sawah tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi hutang (*murtahin*) dan memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil garapan tanah sawah tersebut sudah melebihi jumlah hutang pemilik lahan.³

Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh ibu Uni dan bapa Asep. Ibu Uni pernah menggadaikan sawahnya kepada bapak Nuryono, dimana ibu Uni menggadaikan sawahnya dengan perjanjian jangka waktu gadai selama tiga tahun, namun karena ibu Uni dalam jangka waktu tiga tahun belum bisa

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 79.

³ Wawancara dengan bapak Hardi (Warga Desa Astanalanggar Kec. Losari Kab. Cirebon).

melunasi hutangnya kepada bapak Nuryono, maka tanah sawah tersebut tetap digarap oleh bapak Nuryono selama lima tahun. Begitu juga bapak Asep yang pernah menerima gadai sawah dari bapak Dono. Dimana dalam perjanjiannya jangka waktu gadai yaitu tiga tahun, namun karena bapak Dono tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu tiga tahun, maka bapak Asep tetap menggarap tanah sawah milik bapak Dono, dan akan dikembalikan sampai bapak Dono dapat melunasi hutangnya.⁴

Berdasarkan informasi pelaksanaan gadai di Dusun Mengger Desa Astanalanggar di atas, maka dapat kita ketahui bahwa praktek gadai di desa Astanalanggar tersebut tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang secara khusus mengatur tentang gadai tanah pertanian dan hukum ekonomi syariah. Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 56/PRP/Tahun 1960 menjelaskan tentang praktik gadai sawah yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen.

⁴ Wawancara dengan bapak Asep dan ibu Uni (Warga Desa Astanalanggar Kec. Losari Kab. Cirebon).

(3) Ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan setelah mulai berlakunya peraturan ini.⁵

Dari isi Pasal 7 Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 dapat diketahui bahwa yang menjadi sifat dan ciri-ciri pelaksanaan gadai menurut Hukum Agraria Nasional adalah hak gadai tanah jangka waktunya terbatas yaitu 7 tahun. Jika gadai tanah sudah berlangsung selama 7 tahun, maka hak kuasa atas tanah yang digadaikan berpindah dengan sendirinya kepada pemilik tanah tanpa harus memberikan uang tebusan lagi. Dan pemilik dapat melakukan penebusan tanah yang digadaikan sewaktu-waktu dengan membayar uang tebusan berdasarkan rumus yang disebutkan di atas.⁶ Oleh karena itu, seharusnya praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon apabila telah mencapai waktu 7 tahun, maka tanah sawah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Sedangkan dalam hal pemanfaatan objek gadai, Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 tidak mengaturnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk memanfaatkan atau tidak objek yang digadaikan.

Selain bertentangan dengan hukum positif Indonesia, pelaksanaan gadai di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh nabi disebut dengan riba.⁷ Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواهُ

الْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. وَآخِرُ مَوْقُوفٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ)

⁵ Lembar Negara Nomor 56/Prp/Tahun 1960.

⁶ ihdi

⁷ <https://almanhaj.or.id/2113-memanfaatkan-barang-gadai.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

Artinya: “Dari Ali r.a berkata : Nabi SAW bersabda: Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba ”(HR. Harist bin Usamah, dan isnad hadist ini gugur. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadhalah bin Ubaid. Menurut hadits lain yang diriwayatkan Bukhârî secara mauquf dari Abdillâh bin Salam).

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain ulama mazhab Hanbali berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut. Sebagian ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkan untuk memanfaatkan objek gadai, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu riba yang dilarang syara’.⁸

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, maka menurut sebagian ulama Hanafiyyah, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ
يَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.”⁹(Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi).”

Sedangkan mengenai batas waktu gadai, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 257.

⁹ <https://almanhaj.or.id/2113-memanfaatkan-barang-gadai.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.¹⁰

Ketentuan Pasal 403 ayat (1) dan (2) di atas sudah jelas bahwa jika *rahin* tidak bisa melunasi utangnya maka *murtahin* memberikan peringatan awal dengan memperingati *rahin* untuk melunasinya, dan jika peringatan tersebut tidak bisa membuat *rahin* jera dan belum juga bisa melunasi utangnya, maka harta atau tanah sawah gadai dijual paksa melalui lelang syariah.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam kedua sumber hukum di atas, yaitu Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 dan Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat kita ketahui persamaan kedua sumber hukum tersebut dalam mengatur praktik gadai, yaitu adanya barang jaminan sebagai penangguhan hutang dan penahanan barang jaminan oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaan kedua sumber hukum tersebut yaitu dalam hal pemanfaatan barang jaminan dan berakhirnya akad gadai. Dimana dalam Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 tidak diatur mengenai pemanfaatan barang jaminan hutang, sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut. Namun dalam Hukum Ekonomi Syariah secara tegas telah melarang pemanfaatan barang jaminan hutang karena dapat menimbulkan riba. Selain itu, perbedaan dari kedua peraturan tersebut juga terletak pada waktu berakhirnya akad gadai, dimana dalam Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 batas maksimum waktu gadai yaitu 7 tahun, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah batas waktu maksimum akad gadai yaitu sesuai waktu yang disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

Oleh karena itu, sebagai muslim dan warga negara Indonesia, sudah seharusnya dalam melakukan sebuah tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam agar selamat dunia

¹⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 98-106.

dan akhirat. Sehingga penulis merasa hal ini perlu diteliti secara konkrit terutama dalam hal masalah praktik gadai yang terdapat di daerah tersebut, karena praktik gadai yang terjadi bukanlah sebuah praktik yang ideal, karena tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan di daerah tersebut, karena praktik seperti ini terjadi di lingkungan yang masyarakatnya harus tunduk kepada hukum positif yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, dan hukum Islam sebagai sumber hukum atas suatu kepercayaan. Maka pandangan hukum positif Indonesia dan pandangan hukum Islam akan memberikan jawaban terhadap praktik gadai yang terjadi. Apakah sudah benar pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 dan Hukum Ekonomi Syariah? Karena dalam hal ini mereka memiliki keterbatasan informasi tentang gadai yang seharusnya mereka pahami.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan ini yang dapat diidentifikasi oleh penulis, antara lain:

- a. Pemanfaatan sawah gadai secara penuh oleh pihak penerima gadai
- b. Perpanjangan batas waktu yang tidak ada batas
- c. Praktik gadai sawah di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- d. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon
- e. Tinjauan UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap praktik gadai sawah di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah sangat dibutuhkan sebagai pijakan awal dan landasan penelitian. Batasan masalah ini sangat membantu dalam mempermudah penelitian agar peneliti fokus pada masalah yang ditelitinya. Oleh karena itu, masalah harus sudah diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan dengan jelas, sederhana dan tuntas saat memulai memikirkan penelitian. Dalam hal ini penulis membatasinya dalam hal berikut:

a. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap Praktik Gadai Sawah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

b. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap pelaksanaan gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

d. Apa perbedaan dan persamaan pengaturan gadai sawah dalam Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- d. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pengaturan gadai sawah dalam Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengetahui praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- c. Mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- d. Mengetahui perbedaan dan persamaan pengaturan gadai sawah dalam Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai konsep pelaksanaan gadai sawah menurut hukum

ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960, khususnya pelaksanaan gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

- b. Bagi Masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar mengenai pelaksanaan gadai sawah sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960, agar dalam pelaksanaan gadai tercipta suatu keadilan.

- c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Iva Mustakimah, membahas mengenai praktik gadai sawah berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 56/PRP/Tahun 1960. Hasil dari penelitiannya yaitu gadai sawah dikalangan petani dusun Penoh, Kelurahan Gentan, Kec. Susukan, Kab. Semarang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah mengenai tempo gadai dan UU RI. No.56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Karena dalam praktiknya, pemberi hutang (*murtahin*) memanfaatkan *marhun* sampai orang yang berhutang (*rahin*) dapat melunasi hutangnya, dan

marhun akan dikembalikan apabila orang yang berhutang (*rahin*) dapat melunasi hutangnya.¹¹

2. Penelitian Ihwan Aziz, membahas mengenai praktik gadai sawah berdasarkan Hukum Islam. Hasil dari penelitiannya yaitu praktek gadai tanah sawah yang dilaksanakan di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan tidak sah karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal ini sighat akad. Karena ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Mengenai pemanfaatan tanah sawah tanpa batas waktu oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut hukum Islam tidak sah. Karena adanya unsur eksploitasi dari pihak penerima gadai, serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.¹²
3. Penelitian Aqnes Citra Amalia, membahas mengenai praktik gadai sawah berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 dan Pandangan Tokoh MUI. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan gadai di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri biasa dilakukan dengan perjanjian secara lisan saja dan uang yang dipinjam tidak berpatokan dengan seberapa luas lahan yang digadaikan, tetapi sesuai permintaan penggadai. Dalam perjanjian tersebut juga tidak menetapkan adanya batasan waktu pelaksanaan. Jadi sebelum penggadai belum bisa menebus sawahnya, sawah tersebut tetap digarap oleh pemberi gadai. Masyarakat desa Ngletih juga dalam melakukan praktek gadai tidak melibatkan pemerintah setempat seperti kepala desa, sehingga pemerintah setempat tidak dapat melindungi masyarakatnya yang melakukan gadai apabila terjadi perselisihan. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat desa Ngletih

¹¹ Titik Iva Mustakimah, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 56/PRP/Tahun 1960 terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Penoh Kelurahan Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)." (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹² Ihwan Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)." (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih belum mentaati Undang-Undang No. 56/PRP/Tahun 1960.¹³

4. Penelitian Hanik Musyarofah, membahas mengenai praktik gadai sawah Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960. Hasil penelitian ini yaitu praktik gadai di desa Jambesari tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam sighthat harus dikaitkan dengan sebuah persyaratan yang terkait pemanfaatan penuh barang yang dijaminakan oleh pemberi gadai tanpa adanya bagi hasil terhadap hasil pengelolaannya. Sedangkan menurut UU No. 56/Prp/Tahun 1960 juga praktik gadai di desa Jambesari bertentangan dengan peraturan tersebut, karena dalam praktik gadai tersebut pengembalian barang yang dijaminakan akan kembali jika yang berhutang dapat melunasi hutangnya.¹⁴
5. Penelitian Rinny Dhita Utari, membahas mengenai praktik gadai sawah berdasarkan Hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu praktik gadai di desa Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini karena ketidaksesuaian dari segi pemanfaatan terhadap barang gadai dan dari segi syarat mengenai barang yang digadaikan, utang, dan pernyataan kesepakatan dalam pelaksanaan gadai sawah. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan akad gadai yang ada menjadi batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat gadai yang berlaku dalam hukum Islam. Namun, ada beberapa aspek yang sesuai dengan aturan gadai di dalam hukum Islam, yaitu dari segi rukun gadai dan syarat para pihak yang melakukan gadai.¹⁵

Dalam penelitian terdahulu di atas, hanya menjelaskan mengenai permasalahan tentang praktik gadai sawah berdasarkan tinjauan Hukum Islam

¹³ Aqnes Citra Amalia, "Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁴ Hanik Musyarofah, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Jambesari Kecamatan Pencokusumo Kabupaten Malang." (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹⁵ Rinny Dhita Utari, "Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

dan Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Hal ini berbeda dengan penelitian ini, selain ingin memaparkan praktik gadai sawah berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960, penulis juga ingin memaparkan persamaan dan perbedaan pengaturan gadai sawah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang RI No.56/PRP/Tahun 1960.

F. Kerangka Pemikiran

Gadai merupakan suatu kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak dahulu. Banyak masyarakat yang mempraktikkan kegiatan gadai untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka. Seperti masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang sudah lama mempraktikkan kegiatan gadai dalam memenuhi kehidupan ekonominya. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon cukup sederhana, yaitu dengan menggadaikan barang mereka sebagai jaminan hutang kepada tetangga atau kerabat dekat. Mereka biasanya melakukan gadai dengan menggunakan akad secara lisan dengan batas maksimum waktu gadai yaitu tiga tahun dan penerima gadai (*murtahin*) diberikan hak penuh untuk mengelola tanah sawah dan mengambil manfaatnya. Namun apabila telah jatuh tempo dan penggadai (*rahin*) belum bisa melunasi hutangnya, maka tanah sawah tersebut tidak bisa dikembalikan kepada pemilik tanah (*rahin*), tanah akan dikembalikan sampai penggadai (*rahin*) dapat melunasi hutangnya dan akan terus dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*).

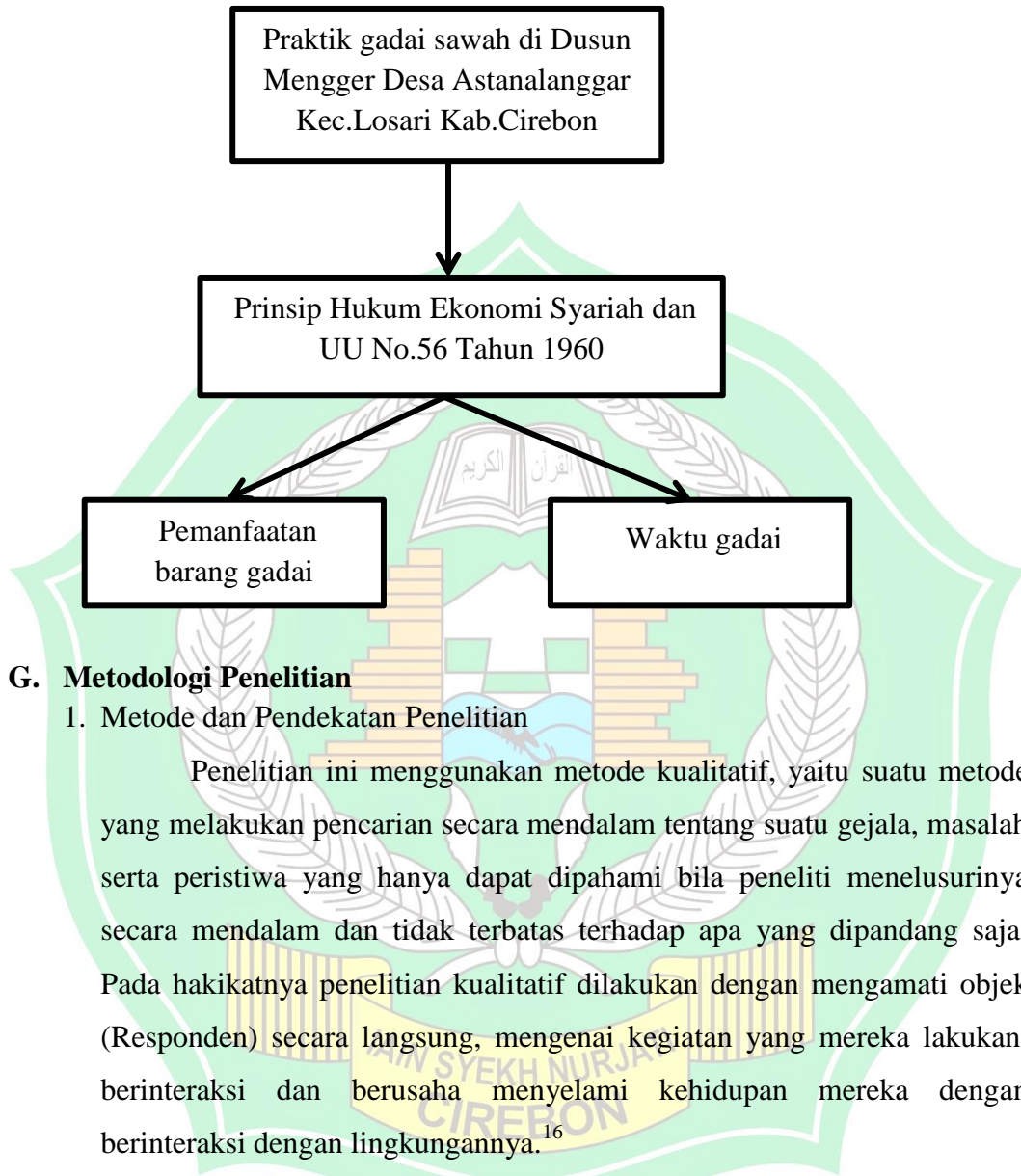
Pada dasarnya, praktik gadai adalah bentuk dari tolong menolong antar sesama manusia. Namun apabila diperhatikan dari praktik gadai yang ada di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, praktik gadai tersebut mengandung unsur pemerasan dan merugikan pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dapat diketahui dari pemanfaatan barang gadai dan waktu gadai yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Karena praktik gadai mengandung unsur pemerasan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa hak gadai sebagai hak sementara harus dihapuskan. Namun pada kenyataannya

sampai saat ini gadai tanah sawah masih belum dapat dihapuskan, hanya saja unsur-unsur pemerasan yang ada di dalam praktik gadai tanah sawah dapat diminimalisir dan unsur-unsur keadilan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan. Peraturan yang dimaksud diantaranya Undang-Undang No.56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Misalnya, pengurangan unsur-unsur pemerasan pada gadai tanah sawah dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang No.56/PRP/Tahun 1960 mengenai batas waktu pelaksanaan gadai, yang dibatasi dalam jangka waktu 7 tahun, dan ketentuan pengembalian uang tebusan.

Selain Undang-Undang No.56/PRP/Tahun 1960, hukum Islam juga telah mengatur dengan jelas mengenai praktik gadai, terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai dan batas waktu pelaksanaan gadai. Dalam hal pemanfaatan waktu gadai, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam haditsnya bahwa *“Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba”*. Maka berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa dalam Syariat Islam melarang adanya pemanfaatan barang yang ditangguhkan. Sedangkan mengenai batas waktu gadai, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 403 bahwa dalam hal jatuh tempo sedangkan orang yang berhutang (*rahin*) tidak dapat melunasi hutangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) diperbolehkan menjual barang yang ditangguhkan untuk melunasi hutang si penggadai (*rahin*), dengan ketentuan bahwa hasil penjualan diambil sesuai jumlah hutang dan kelebihan hasil penjualannya diberikan kepada penggadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang melakukan pencarian secara mendalam tentang suatu gejala, masalah serta peristiwa yang hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak terbatas terhadap apa yang dipandang saja. Pada hakikatnya penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek (Responden) secara langsung, mengenai kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dan berusaha menyelami kehidupan mereka dengan berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁶

Dalam penelitian ini nanti, penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*), Jenis Penelitian penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach* (Yogyakarta: Depublish, 2017), 5.

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui serta mendalami bagaimana tjiwaan hukum Islam dan UU No 56 PRP Tahun 1960 terhadap pelaksanaan gadai sawah di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih metode studi kasus karena metode ini sesuai untuk mendeskripsikan temuan kasus- kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai sawah tersebut dengan terjun langsung kelapangan yaitu di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah data penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ilmiah ini dilakukan di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan November sampai bulan Desember 2020.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dan obyek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

5. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 20.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, baik itu orang yang pernah melakukan kegiatan gadai sawah ataupun pemerintah desa setempat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data lain atau data tambahan yang dapat menunjang dan memperkuat data primer baik yang diperoleh dari buku-buku, artikel maupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berupa dokumen, brosur, dan data artikel serta jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon guna mengetahui praktik gadai sawah di desa tersebut, yang kemudian dikaji dengan Undang-Undang RI No. 56/PRP/Tahun 1960 dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data observasi terhadap objek penelitian. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan subyek atau informan penelitian secara lisan

¹⁸ Muharto, Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Jakarta: Deepublish, 2016), 83-84.

untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari subyek penelitian mengenai praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada masyarakat desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang terdiri dari *rahin* (orang yang berhutang dan menggadaikan barang), *murtahin* (pihak yang memberi hutang), Kepala Desa atau aparat desa lain, dan tokoh MUI Losari.

c. Dokumentasi

Teknik dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari catatan transkrip, internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda dokumen, buku-buku, dan peraturan-peraturan. Peneliti berusaha menggali data dengan cara menelaah arsip-arsip dan rekaman untuk menggali mengenai gadai dan praktik gadai di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Adapun arsip-arsip yang ditelaah dalam penelitian ini ialah berkisar tentang profil desa, serta buku-buku yang berhubungan dengan gadai.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan.²¹

¹⁹ Muharto, Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Propossal Penelitian ...*, 85.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145.

²¹ Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), 72.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian guna menilai benar tidaknya menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 56/Prp/Tahun 1960.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat/tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteksnya (*dependability*), dan dapat/tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).²²

Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

²² Sylvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi...*, 73.

- c. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu membahas mengenai teori yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) dalam perspektif hukum Islam dan UU no 56/Prp/Tahun 1960, yang merupakan hasil dari beberapa telaah literatur yang berkaitan dengan studi yang akan penulis teliti, yaitu meliputi pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban masing-masing pihak, status marhun, sehingga penulis dapat memahami materi untuk menganalisis permasalahan yang terjadi.

Bab III, yaitu membahas data yang telah dikumpulkan dan akan dideskripsikan secara obyektif tentang gambaran umum obyek penelitian dan deskripsi pelaksanaan gadai sawah di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Bab IV, yaitu berisi tentang praktek gadai yang terjadi di desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan UU No. 56/Prp/Tahun 1960.

²³ Titik Iva Mustakimah, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 56/PRP/Tahun 1960 terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Penoh Kelurahan Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang) (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), 15-16

Bab V, yaitu merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

I. Rencana Waktu Penelitian

| No. | Uraian | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 | Des 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Konsultasi Penyusunan Laporan | * | * | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | * | * | | | | | |
| 3 | Peng SK-an Pembimbing | | | * | | | | | |
| 4 | Bimbingan Pembuatan Skripsi | | | | * | * | * | | |
| 5 | Munafasah | | | | | | | * | |